

KETERLIBATAN BANDIT, PELACUR DAN SENIMAN DALAM PERJUANGAN KEMERDEKAAN DI JAWA TIMUR (1945-1950)

Ari Sapto

Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang

Abstrak: Bandit, pelacur dan seniman adalah kelompok sosial yang sering luput dari perhatian sejarawan. Mungkin karena posisi sosial mereka yang bukan elite sehingga dalam perkembangan Ilmu Sejarah yang mengarah pada demokratisasi, maka semua kelompok sosial dipandang memiliki peluang yang sama untuk ditulis sejarahnya. Dalam periode Revolusi Nasional Indonesia (1945-1950) untuk menghadapi keunggulan militer pihak Belanda, tentara Indonesia dipaksa untuk melakukan mobilisasi sumberdaya. Dalam konteks itu, bandit, pelacur dan seniman terlibat dalam perjuangan kemerdekaan. Kontribusi mereka tidak kecil, tetapi dalam suasana kajian sejarah yang berpihak pada elite, perannya seakan-akan terlupakan. Dalam perjuangan kemerdekaan di Jawa Timur bandit, pelacur dan seniman dimobilisasi dan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Melalui berbagai peran yang sesuai dengan "ketrampilan"-nya memberi dukungan terhadap perjuangan. Resikonya tidak kecil, nyawa taruhannya, tetapi mereka rela melakukan. Ironisnya, perjuangannya hanya tercatat dalam dokumen dan setelah kemerdekaan tercapai jasa-jasanya dilupakan.

Kata-kata kunci: bandit, pelacur, seniman, perjuangan kemerdekaan

Abstract: *Bandits, prostitutes, and artists are social groups that frequently ignored by the historians. Potentially their social position as non-elite class causes its marginalization. Hence, in the development of history as science that headed to democratization, all social groups are seen as having equal opportunities to write their history. Facing the superiority of Dutch military in the Indonesian National Revolution period (1945-1950), the Indonesian army was forced to mobilize all resources. In that context, bandits, prostitutes, and artists were involved in the struggle for independence. Their contribution is very important, but in an atmosphere of historical studies that highlight the elite, their role seems to be marginalized. The independence war in East Java records band of bandits, prostitutes and artists who were mobilized and utilized for various purposes. Through various roles in accordance with their "skills", it provides support for the independence. The duty were very risk to their lives, but they doing it voluntarily. Ironically, their heroism only recorded in the old archives and forgotten after independence.*

Keywords: *bandit, prostitute, artist, struggle for independence*

PENDAHULUAN

Perjuangan kemerdekaan atau Revolusi Nasional Indonesia dipandang sebagai sebuah gejala sejarah yang kompleks. Masih terdapat perbedaan untuk memberi label peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kurun 1945-1949. Istilah Revolusi Indonesia atau Revolusi Nasional Indonesia dipakai karena dampak besar yang

dihasilkannya adalah terciptanya Negara Indonesia. Di samping itu, ada istilah Perang Kemerdekaan yang masih menjadi perdebatan di antara para ahli. Perang Kemerdekaan oleh sebagian ahli dipandang sebagai istilah yang dipakai ahli strategi dan kelompok militer, karena ingin memaksakan format non-revolusioner dan mengangkat peristiwa-peristiwa periode 1945-1949 sebagai sumber legitimasi Angkatan Bersenjata. (Reid, 1981: 33-35).

Di sini digunakan istilah Perjuangan Kemerdekaan yang dipandang lebih halus dan netral.

Sebagai sebuah proses, Revolusi Nasional Indonesia merupakan interaksi faktor-faktor internal dan eksternal. Meskipun dapat dibedakan, keduanya tidak dapat dipisahkan, terjalin secara erat sejak Proklamasi Kemerdekaan hingga KMB (Konferensi Meja Bundar). Kartodirdjo (1981: 4) mengungkapkan, bahwa Revolusi Indonesia merupakan proses politik yang terus menerus dipengaruhi faktor internal dan eksternal itu, sehingga bentuk dan arahnya ditentukan olehnya. Lebih lanjut dijelaskan, bahwa faktor eksternal adalah diplomasi atau konstelasi internasional yang tersusun oleh hubungan antara nasion-nasion, sedangkan faktor internal adalah interaksi antara golongan-golongan. Pemahaman ini dapat diperluas, terutama faktor eksternalnya. Semua kekuatan dari luar yang ikut campur pada jalannya Revolusi Indonesia dapat dipandang sebagai faktor eksternal (Poeze, 2008: ix).

Selama berlangsungnya (1945-1949), revolusi sempat bergerak ke kiri sebelum akhirnya mengarah ke kanan. Dalam studi Brinton (1965: 123) dapat dijelaskan bahwa dalam empat revolusi yang dikaji ada kecenderungan bahwa kekuasaan beralih dari kanan ke tengah dan kemudian ke kiri. Dari golongan konservatif (kanan) kepada golongan moderat (tengah), lalu ke golongan radikal (kiri). Di Amerika pergerakan ini tidak pernah meluncur jauh ke kiri. Para pemimpin Indonesia melihat arah kanan itu jalan yang paling singkat mencapai pengakuan kedaulatan.

Dimensi internal revolusi adalah interaksi antar kekuatan dan kepentingan di dalam Republik. Kekuatan yang menonjol direpresentasikan dengan keberadaan partai-partai politik, badan-badan perjuangan, dan militer. Aliran paham yang telah ada pada masa pergerakan menemukan kembali

pengikutnya dan turut mewarnai pergulatan politik pada masa ini. (Pranoto, 2001: 131-144; Feith & Lance Castles, 1988: xxv-xxx; Dhakidae, 1981: 19-21). Dalam proses mewujudkan kepentingan-kepentingan mudah terjadi konflik antargolongan. Titik kulminasi interaksi yang berujung konflik antar golongan tampak dalam peristiwa-peristiwa, yaitu dinamika lembaga Komite Nasional Indonesia Pusat (Maklumat No. X dan perubahan mendasar sistem pemerintahan dari Presidensiil ke Parlemen), Peristiwa 3 Juli 1946, pergantian kabinet, reaksi atas serangkaian persetujuan (Linggarjati, Renville, Roem-Roijen, KMB), dan Peristiwa Madiun.

Selama penjajahan Jepang pelacuran cenderung meningkat. Di samping penghidupan yang bertambah sulit, banyak perempuan dewasa dan anak-anak sekolah yang tertipu atau dipaksa memasuki dunia pelacuran. Selain memaksa perempuan pribumi dan perempuan Belanda menjadi pelacur, penjajah Jepang juga membawa banyak perempuan ke Singapura, Malaysia dan Hongkong untuk melayani para perwira tingginya (Hull, Sulistyarningsih, Jones, 1999: 13-14). Sebagaimana terjadi di wilayah lain yang dijajah Jepang, banyak wanita dipaksa menyediakan jasa seksual bagi militer Jepang. Dalam bahasa Jepang disebut jugun ianfu, berarti wanita-wanita penghibur yang mengikuti angkatan bersenjata Jepang (Lucas, 1996: 21). Jumlahnya tidak diketahui, sebagian karena budaya malu untuk mengungkapkan pengalaman buruk mencegah banyak wanita Jawa menyampaikan informasi sebenarnya.

Kelompok lain yang sering dikaitkan dengan penyakit masyarakat adalah pelaku kriminal. Dalam kehidupan sering akrab dengan kekerasan dan keberadaannya sering kurang disenangi, tetapi dalam beberapa hal dibutuhkan

dokumen yang diterbitkan, dokumen pengalaman pelaku (tidak diterbitkan), surat kabar dan majalah, terbitan berkala, serta buku-buku. Sumber-sumber tersebut tersebar di beberapa kota, yaitu Malang, Surabaya, Surakarta, Yogyakarta, dan Jakarta. Secara rinci lokasi pengambilan data sebagai berikut : Jakarta: Arsip Nasional RI dan Perpustakaan Nasional, Yogyakarta: Perpustakaan Daerah dan Perpustakaan Universitas Gadjah Mada, Surakarta: Monumen Pers, Surabaya: Badan Arsip Jawa Timur dan DHD 45, Malang: Museum Brawijaya dan Arsip Daerah.

Sumber yang berupa arsip dapat dicontohkan koleksi ANRI dari Kementerian Penerangan, kementerian Dalam Negeri, Kementerian social dan Perburuhan, dan lain-lain. Mengenai berbagai koleksi surat kabar dapat ditemukan di Perpustakaan Nasional dan Monumen Pers di Surakarta. Catatan pengalaman pelaku sejarah seringkali menyinggung tentang topik penelitian ini. Perpustakaan DHD 45 dan Badan Arsip Jawa Timur menyimpan berbagai rekaman wawancara dan catatan pengalaman pelaku yang dibutuhkan.

Kritik adalah upaya memperlakukan kesejatan sumber. Untuk memperoleh data yang benar-benar akurat dan valid ditempuh dua langkah, yaitu kritik terhadap otensitas (kritik ekstern) dan kredibilitas (kritik intern). Kritik ekstern bertugas menjawab tiga pertanyaan mengenai sesuatu sumber, yaitu apakah sumber itu sumber yang dikehendaki, apakah sumber itu asli atau turunan, dan apakah sumber itu utuh atau telah diubah. Kritik intern bekerja melalui dua cara, penilaian intrinsik sumber dan membandingkan kesaksian dari berbagai sumber.

Secara khusus, sebagaimana penilaian terhadap kesediaan sumber, pada tahap heuristik dan kritik perlu diketahui alam pikiran para pemberi informasi. Iden-

tifikasi pemikiran ini perlu untuk menyaring keterangan, bagian mana yang benar-benar terjadi dan mana yang merupakan tafsiran penulis atau informan tentang apa yang benar-benar terjadi. Di sini diperlukan kemampuan hermeneutik. Penekanan ini perlu, sebab masa revolusi bagi kelompok tertentu dipakai sebagai sumber legitimasi kekuasaan.

Tahap berikutnya adalah interpretasi data, yakni menetapkan makna dan saling hubungan dari fakta yang diperoleh. Penulisan, menyampaikan sintesa yang diperoleh dalam bentuk tulisan secara sistematis dan logis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bandit

Perlu disebut kelompok masyarakat yang akrab dengan kekerasan, keberadaannya sering kurang disenangi tetapi dibutuhkan pihak-pihak tertentu. Dalam kancah revolusi kelompok semacam ini menonjol di beberapa tempat. Beberapa kepustakaan memberi label dengan istilah jago (Gunawan, 1981; Slamet-Velsink, 2001:70; Cribb, 1991; Lucas, 1989; McVey, 1971: 139). Di Jawa Timur, pihak militer berusaha menjinakkan dan memanfaatkannya dengan memberikan kedudukan resmi dalam militer. Keberanian dan keahlian dalam dunia kekerasan sangat membantu dalam strategi perang gerilya. Melalui alat paksaan biasanya jago menjadi pelayan bagi siapa yang mampu memberikan upah. Para jago mempunyai jaringan luas dan dengan jaringan itu banyak mengetahui apa yang terjadi di daerah-daerah tertentu. Salah seorang diantaranya adalah Matosin, seorang jago dari Surabaya. Matosin seorang yang butahuruf tetapi menyandang pangkat Letnan, memimpin kompi yang anggotanya terdiri dari pencuri dan perampok (Wawancara

dengan Moh. Rifai; Pengakuan Kartirin Ask, dalam DHD '45, 1976). Contoh lain, narapidana rumah penjara Kalisosok juga memiliki andil dalam perjuangan kemerdekaan. Sejak awal-awal kemerdekaan para narapidana telah memiliki "Markas Besar", bertempat di penjara Kalisosok juga. Situasi kacau menyebabkan para napi tidak terurus. Keakrapan dengan dunia kekerasan yang sesuai dengan situasi konflik barangkali menjadi motivasi utama pemanfaatan tenaganya. Beberapa nama dari Kalisosok yang cukup disegani ialah Sarpin, Kusnadi, Kasbi dan Semin (Prawirodirdjo, 1978: 215-217).

Pihak militer juga melepaskan para pelaku tindak kriminal dari penjara untuk diberi tugas khusus: mengacaukan blokade laut Belanda di sekitar Selat Madura. Para penjahat ini diperlengkapi senjata api oleh TNI. Untuk mengatasi aktifitas eks narapidana ini, pos-pos militer kecil dibangun sepanjang selat. Demikian pula patroli laut sering dilakukan, tapi terbukti tidak mampu mengurangi gangguan perompakan (Situatie-overzicht per 31 Desember 1947 – 10 Januari 1949, Algemene Secretarie, ANRI, no. inv. 558).

Teritorial Komando Jawa Timur merengkut pelaku kriminalitas dengan tugas utama membikin kekacauan di daerah yang dikuasai Belanda. Sebagian dari gerombolan itu bertindak sebagai "bandit sosial". Sebagai contoh Juwahir, seorang jago dari daerah Kediri yang dimanfaatkan TNI untuk berbagai kepentingan. Juwahir yang sudah tidak asing lagi dengan penjara, memiliki kelompok yang sering melakukan perampokan, terutama pada gudang-gudang yang dikuasai Belanda, seperti gudang gula, atau pada orang-orang yang dicurigai sebagai kaki tangannya. Gerombolan Juwahir bersenjata api dan sering mengaku sebagai tentara. Hasil kejahatan gerombolan Juwahir tidak hanya

untuk diri sendiri dan tentara, tetapi sebagian juga diberikan kepada masyarakat. Bagi masyarakat Juwahir dianggap tokoh yang secara nyata mencintainya, tidak heran bila masyarakat dengan sukarela melindunginya (Keamanan dalam negeri, Djogja Documenten, ANRI, no. inv. 194; Drooglever, 1986c : 636).

Dalam suatu penelitian tentang perampokan dan penyamunan di Gorang-gareng dan Sumoroto (Karesidenan Madiun) diketahui pimpinan gerombolan adalah "pemain lama". Pada zaman penjajahan Belanda pemimpin gerombolan telah aktif di dunia hitam. Sebagian bahkan telah sempat dipenjara. Ketika revolusi meletus dan konfrontasi dengan pihak Sekutu dan Belanda tidak dapat dielakkan, pimpinan gerombolan ikut berjuang di garis depan (Keamanan dalam negeri, Djogja Documenten, ANRI, no. inv. 194; Pandji ra'jat, 13 Juli 1948). Dalam kondisi krisis ini pimpinan dari gerombolan itu lantas dimanfaatkan oleh TNI untuk kepentingan perjuangan. Sebagai contoh, Rujito Sosrokardono, salah seorang alumni pertempuran Surabaya, menjadi pemimpin gerombolan bromocorah yang disegani di daerah ini (Pengakuan Moch. Sifun, dalam DHD '45, 1972).

Pada awal kemerdekaan dikenal laskar bernama Barisan M (Maling). Dalam perkembangannya ketika laskar harus diintegrasikan dalam TNI gerombolan pencuri ini diwadahi dalam Kompi Matosin (Wawancara Moh. Rifai, 6 April 2009). Matosin mempunyai jaringan cukup luas terutama di kota Surabaya, sehingga biasa ke luar masuk kota itu untuk melakukan operasi. Kompi Matosin sangat membantu dalam menyediakan barang-barang yang sulit didapat di daerah kekuasaan Republik, seperti obat-obatan, peralatan medis, suku cadang kendaraan, dan lain sebagainya. Dapat dikatakan apa yang dibutuhkan oleh

Republik kelompok ini sanggup menguasakan, termasuk senjata. Syarif Thayip mempunyai pengalaman dengan kelompok ini. Sebagai seorang dokter suatu saat amat membutuhkan alat cabut gigi, maka dirinya “pesan” pada Matosin. Rupanya sang pencuri tidak paham bentuk alat untuk cabut gigi, terbukti setelah berhasil masuk rumah sakit merasa kebingungan. Akhirnya, semua alat yang mudah dibawa dan tersedia di ruangan rumah sakit diambil. Demikian pula ketika dibutuhkan ban mobil, sang pencuri kembali tidak hanya ban tapi lengkap dengan pelegnya. Lebih dari itu, harus diakui beberapa mobil milik perwira TNI di Jawa Timur merupakan hasil kerja kesatuan ini (Rekaman wawancara: Syarif Tayib, ANRI, no. inv. 79). Matosin adalah salah satu dari sedikit perwira TNI yang berlatar belakang dunia gelap. Buta huruf tapi sangat dihormati dan dipatuhi anak buahnya. Kesatuannya menjadi Kompi Pengawal dalam struktur organisasi Divisi I Jawa Timur. Pensiun sebagai anggota TNI dengan pangkat Letnan Dua, artinya sejak masuk sebagai anggota TNI hingga pensiun pangkatnya tetap sama. (Wawancara dengan Moch. Rifai, 6 April 2009; Semdam VIII/Brawijaya, 1968): 160).

Organisasi dengan nama “Barisan Maling” juga ada di daerah Kawi Selatan. Meskipun namanya sama, organisasi ini tidak ada hubungannya dengan “Barisan Maling” yang kemudian menjelma sebagai Kompi Matosin. “Barisan Maling” di Kawi selatan dimanfaatkan Brigade XVI untuk memperoleh barang-barang yang dibutuhkan, mesin ketik misalnya, dan untuk mendapat informasi tentang keadaan kota. “Barisan Maling” kebanyakan beroperasi di dalam Kota Malang (Padmodiwiryo, 1995: 316).

Sementara pelaku tindak kriminal dan eks narapidana yang lain bertugas mencuri, merampok dan minta uang

kepada orang-orang kaya di daerah yang dikuasai Belanda, para pencopet juga direkrut dan dimanfaatkan untuk tenaga kurir (Mustopo, tt: 27). Jaringan dan keahlian para pencopet sangat dibutuhkan terutama untuk menjalin komunikasi daerah-daerah yang diduduki Belanda dengan daerah yang relatif masih bebas (Daerah pendudukan, Sekretariat Negara, ANRI, no. inv. 755). Berbeda dengan kompi Matosin, para penjahat yang tergabung dalam organisasi “Terate” bukan tentara, melainkan sebagai warga biasa. Berdasar ketentuan tidak tertulis setiap anggota “Terate” dalam melakukan aksi tidak bertindak sendiri. Bila hendak beroperasi sebelumnya harus melapor pada instansi kepolisian RI atau organisasi lain yang berdekatan dengan sasaran yang dituju. Kenyataannya ketentuan ini tidak sepenuhnya dipatuhi. Seringkali kelompok ini bertindak sendiri-sendiri, sehingga mengundang protes. Bagi yang tidak setuju dengan keberadaan “Terate”, wadah bagi para pelacur dan pelaku kriminalitas ini dianggap sebagai noda dalam perjuangan (Rapat Territorial Commando Djawa Timur, Kementerian Penerangan, ANRI, no. inv. 167).

B. Seniman

Penerangan dan usaha menggugah semangat perjuangan juga dilakukan dengan pertunjukan sandiwara. Kelompok sandiwara “Pancawarna” melakukan pertunjukan keliling. Lakon-lakon yang dimainkan bernuansa perjuangan, seperti: Bambu Runcing, Bunga Indonesia, dan Sumpah Pemuda (Pedoman, 13 April 1950). Pertunjukan sandiwara tidak harus dilakukan oleh kelompok dan pemain profesional semacam grup “Pancawarna”. Gerilyawan juga mampu bertindak sebagai pemain dalam pertunjukan sandiwara (Padmodiwiryo, 1995: 308). Kegiatan yang sama dilakukan grup ketoprak “Krido

Budoyo". Kelompok ketoprak ini bahkan ikut bergerilya di daerah Malang ketika saat-saat awal tentara Belanda melakukan serangan militer (Pedoman, 24 April 1950). Ludruk adalah kesenian khas Jawa Timur yang sejak jaman penjajahan Jepang dipakai sebagai sarana menggugah kesadaran perjuangan. Semangat ini terus dilanjutkan, meskipun ketika Belanda melakukan serangan militer para pemainnya sempat kembali ke rumahnya. Setelah situasi agak tenang para pemain kembali lagi pada kelompoknya. Kelompok ludruk "Sekar Mulya" giat menyalaikan api semangat perjuangan dengan menggubah kidungan-kidungan yang bermuansa menebalkan solidaritas.

Sebagai contoh,

*Tali dawa arane tampar
Sisetan aja nganti udhar
Senajane ana bledhek ngampar
Persatuan kita aja nganti buyar
(Tali panjang bernama tampar
Ikatlah yang kencang jangan
sampai terurai
Biarpun ada halilintar menyambar
Persatuan kita jangan sampai bu-
bar)*

*Benang lawe duduk tali tampar
Tape ketan pena rageni
Persatuan kita aja nganti buyar
Obahe zaman wis pena ngerteni
(Benang lawe bukan tali tampar
Tape ketan anda beri ragi
Persatuan kita jangan sampai bu-
bar
Perubahan zaman sudah anda
mengerti)*

(Tashadi, Darto Harnoko,
Suratmin, 1999: 70-92)

Hasil dan pembahasan sesuai dengan tujuan yang dipaparkan pada pendahuluan. Hasil dan pembahasan sesuai dengan tujuan yang dipaparkan pada pendahuluan. Hasil dan pembahasan sesuai

dengan tujuan yang dipaparkan pada pendahuluan. Hasil dan pembahasan sesuai dengan tujuan yang dipaparkan pada pendahuluan. Hasil dan pembahasan sesuai dengan tujuan yang dipaparkan pada pendahuluan.

Di daerah Wajak (Malang Selatan) sudah sejak agresi militer pertama seniman-seniman ludruk yang turut mengungsi membentuk SAGRI (Sandi-wara Angkatan Gerilya Republik Indonesia). Diasuh oleh komandan Mobrig, Sanusi. Tujuan perkumpulan ludruk yang dipimpin oleh Said Djajadi ini untuk memberi penerangan kepada rakyat dan memberi hiburan kepada para pejuang kemerdekaan (Supriyanto, 1984: 23).

Sebagai sarana penerangan kepada rakyat, Jawatan Penerangan menciptakan Wayang Suluh. Wayang Suluh dibuat pertama kali oleh Sukemi, pegawai Jawatan Penerangan Madiun. Setelah melalui uji coba diperkenalkan secara resmi melalui pagelaran di Balai Rakyat Kota Madiun pada 10 Maret 1947. Pada awalnya dinamakan Wayang Merdeka, nama yang masih tentatif. Dalam pagelaran perdana itu ditawarkan nama yang mungkin sesuai. Muncul nama Wayang Suluh yang menjadi identitas selanjutnya (Bundi, dkk., 1993/1994: 6).

Wayang Suluh berbeda dengan Wayang Purwa atau Wayang Kulit, juga berbeda dengan Wayang Golek, Wayang Beber, Wayang Gedhok, dan lain sebagainya. Motif Wayang Suluh menggambarkan manusia dari berbagai latar belakang, seperti para pemimpin rakyat, tentara, kaum buruh, dan lain-lain. Tidak ketinggalan menggambarkan berbagai kendaraan, sebut saja truk, mobil, cicar dan dokar. Juga dilengkapi alat perang modern, seperti pesawat terbang, metraliur, bom, dan lain-lain. Dalam Wayang Suluh masyarakat dari wilayah budaya berbeda dilukiskan secara berbeda pula. Dengan

demikian masyarakat Mataraman berbeda dengan Madura, berbeda pula misalnya dengan Panaragan. Wayang Suluh umumnya dibuat dalam ukuran tinggi 40-50 cm, lebar seimbang dengan tingginya. Ukuran demikian dipandang cukup ideal untuk pertunjukan terbuka (Pelaporan mengenai tontonan rakyat, Kementerian Penerangan, ANRI, no. inv. 82).

Kecuali tentang cerita dan bentuknya unsur lain dalam wayang Suluh tidak berbeda dengan Wayang Purwo. Seperti dalam Wayang Purwo, pertunjukan Wayang Suluh menggunakan layar berwarna putih (geber). Musik pengiring pun sama, yaitu gamelan. Suara mobil, pesawat, letusan senjata, dan lain-lain dapat diselaraskan dengan gamelan atau ketukan dalang (Tashadi, Darto Harnoko, Sutarmin, 1999: 92-94; Bundi, dkk., 1993/1994: 23-37). Musik pengiring bersifat fleksibel. Bila dipentaskan di pesantren dapat menggunakan musik pengiring terbang kentrung (Sukadri, Soewarno, Umiati, 1991: 229). Jumlah wayangnya tidak sebanyak Wayang Purwo, berkisar antara 50 – 75 buah. Sewaktu-waktu dapat ditambah bergantung kebutuhan dalam cerita. Demikian pula cara mengatur wayang-wayang yang tidak muncul dalam cerita yang dipentaskan, disusun berjajar di kanan kiri layar menghadap ke luar (Pelaporan mengenai tontonan rakyat, Kementerian Penerangan, ANRI, no. inv. 82; Sebagai perbandingan lihat Groenendaal, 1987).

Cerita yang dimainkan umumnya yang berkaitan dengan suasana perjuangan. Pemilihan nama tokoh dalam cerita sudah menggambarkan misi di balik pementasan. Nama Beja (untung) dan Slamet (selamat) jelas sengaja dipilih untuk melukiskan keterlibatan rakyat jelata, sebab kedua nama itu tidak populer di lingkungan priyayi. Dengan kata lain, pementasan dimaksudkan untuk meraih dukungan rakyat.

Lebih ditegaskan lagi dengan munculnya tokoh pedagang dan petani. Pedagang mengerakkan sektor perdagangan dan petani yang menggeluti lahannya, sudah merupakan bentuk dukungan yang sangat berarti. Di samping itu, cerita dalam pagelaran Wayang Suluh juga menyentuh berbagai aspek perjuangan, seperti peranan PMI, laskar, tentara, nilai pengorbanan, keterlibatan rakyat, dan juga nilai kesetiaan.

C. Pelacur

Komersialisasi seks di Indonesia telah berkembang cukup lama. Tercatat pada tahun 1650 sudah didirikan House of Correction for Women (panti perbaikan perempuan) dengan maksud untuk merehabilitasi para perempuan yang bekerja sebagai pemuas kebutuhan seks orang-orang Eropa (Hull, Endang Sulistyarningsih, Gavin W. Jones, 1999: 4; Utomo, dkk., 2001: xix). Rupanya dengan semakin melebar dan mendalamnya kolonialisme, prostitusi juga semakin marak. Pada tahun 1852 pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang menyetujui komersialisasi industri seks (Hull, Endang Sulistyarningsih, Gavin W. Jones, 1999: 4). Dengan keluarnya *Memory van Toelichting* tanggal 1 Januari 1873, peraturan pemerintah tahun 1852 tersebut dicabut (Utomo, dkk., 2001: xix-xx).

Peraturan baru menetapkan bahwa tanggung jawab pengawasan rumah bordil dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (Hull, Endang Sulistyarningsih, Gavin W. Jones, 1999: 5; Utomo, dkk., 2001: Xx). Hal ini menunjukkan bahwa prostitusi menjadi persoalan serius bagi pemerintah daerah. Surabaya menjadi kota yang terkenal karena aktifitas prostitusinya. Kebutuhan perempuan lacur terbilang tinggi karena Surabaya berkembang menjadi kota pelabuhan penting, tempat pangkalan angkatan laut, markas tentara

dan tujuan akhir kereta api. Pada tahun 1939 di Surabaya terdapat delapan kategori pelacuran.

“(1) Prostitutes based in small cafes near the harbour and in the old port town; (2) Street prostitutes from local kampung; (3) Brothels in the centre of the city owned by Chinese and Japanese; (4) Brothel kampung on the outskirts of the city; (5) Discreet services of native female servants; (6) Even more discreet services of housebound Dutch women for young, unmarried dutch men; (7) European prostitution in organized brothels; (8) Homosexual prostitution and pederasty” (Hull, Endang Sulistyaningsih, Gavin W. Jones, 1999: 7).

(1) Pelacur yang mangkal di kedai-kedai kecil sekitar pelabuhan dan di kota pelabuhan itu sendiri; (2) Pelacur yang beroperasi di jalanan, berasal dari kampung-kampung setempat; (3) Rumah-rumah bordil di pusat kota milik orang Cina dan Jepang; (4) Lokalisasi rumah-rumah bordil di kampung di pinggiran kota; (5) Jasa pelayanan seks terselubung yang diberikan oleh para pembantu rumah tangga perempuan lokal; (6) Jasa pelayanan seks amat terselubung yang dilakukan oleh para nyonya (ibu rumah tangga) Belanda yang terkekang di rumah kepada sinyo-sinyo muda yang belum menikah; (7) Pelacur warga negara Eropa yang terorganisir dilokalisasi tertentu; (8) Pelacuran homoseksual dan perjantanan).

Selama penjajahan Jepang pelacuran cenderung meningkat. Di

samping penghidupan yang bertambah sulit, banyak perempuan dewasa dan anak-anak sekolah yang tertipu atau dipaksa memasuki dunia pelacuran. Selain memaksa perempuan pribumi dan perempuan Belanda menjadi pelacur, penjajah Jepang juga membawa banyak perempuan ke Singapura, Malaysia dan Hongkong untuk melayani para perwira tingginya (Hull, Endang Sulistyaningsih, Gavin W. Jones, 1999: 13-14). Sebagaimana terjadi di wilayah lain yang dijajah Jepang, banyak wanita dipaksa menyediakan jasa seksual bagi militer Jepang. Dalam bahasa Jepang disebut jugun ianfu, berarti wanita-wanita penghibur yang mengikuti angkatan bersenjata Jepang (Lucas, 1996: 21).Jumlahnya tidak diketahui, sebagian karena budaya malu untuk mengungkapkan pengalaman buruk mencegah banyak wanita Jawa menyampaikannya informasi sebenarnya.

Setelah kemerdekaan, dalam situasi yang tidak menentu, prostitusi belum mendapat penanganan yang serius. Jawatan Sosial tidak mampu membantu kebutuhan orang-orang yang perlu mendapat bantuan, seperti para pelacur, karena keadaan keuangan tidak mengijinkan. Pada masa revolusi ini, di samping pelacur, di jalan-jalan banyak terlihat orang-orang yang tidak mempunyai tempat tinggal. Kaum gelandangan ini tidur di sembarang tempat, di tepi jalan atau di depan toko-toko (Laporan bulanan, Kabinet Perdana Menteri RI Yogya, ANRI, no. Inv. 75). Di beberapa kota pengemis merajalela. Akan tetapi diragukan apakah benar-benar karena kekurangan yang demikian tidak bertanggung. Di antara pengemis itu ada yang pura-pura bisu atau sakit, pura-pura pincang atau pura-pura luka hingga berborok. Para pengemis itu mempunyai pimpinan yang ditakuti dan ditaati. Kerjasama juga tampak di antara para pengemis itu (Pedoman, 24 April 1950). Ada perbedaan

pengertian antara pengemis dengan gelandangan. Gelandangan tidak memiliki tempat tinggal, sementara pengemis biasanya masih memiliki rumah (Alkostar, 1994: 100).

Domine Warnes, kepala kantor “Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Penerbitan Cabul” dari Kementerian Sosial RIS menjelaskan bahwa pelacuran di Indonesia disebabkan beberapa alasan. Keadaan sosial-ekonomi yang buruk menjadi faktor utama. Kondisi ini tidak memberi kemungkinan yang layak bagi wanita, terutama dari lapisan rendah untuk hidup semestinya. Jumlah dari kelompok ini paling banyak. Alasan lain, pergolakan politik berpengaruh pada berbagai bidang yang pada akhirnya menyentuh kemerosotan moral. Rasa superioritas kaum laki-laki merupakan faktor berikutnya yang ikut menyumbang munculnya masalah sosial ini. Akhirnya, keinginan memperoleh kekayaan dengan cara mudah dan cepat menjadi pendorong wanita terjun ke dunia prostitusi (Merdeka, 9 Juni 1950; Pedoman, 9 Juni 1950). Berbagai faktor penyebab ini masih perlu ditambah, yaitu kurang kuatnya iman dan rasa kecewa karena kegagalan membina rumah tangga (Minggu Pagi, 5 Oktober 1950), tertipu laki-laki lantas malu pulang ke rumah kemudian menceburkan diri ke dunia prostitusi dan tidak kalah pentingnya faktor lingkungan.

Selama agresi militer yang kedua diperkirakan jumlah pelacur di Indonesia sekitar 100.000 orang. Jakarta sebagai kota terbesar diperkirakan menampung tidak kurang 20.000 orang (Merdeka, 9 Juni 1950), lainnya tersebar di berbagai kota di Indonesia. Wanita-wanita yang terjun ke dunia pelacuran dapat dibedakan dalam tiga tingkatan, yaitu benar-benar baru, sudah agak lama tapi ahlaknya masih dapat diperbaiki dan terakhir, wanita yang

imannya sudah bejat serta sulit diajak kembali ke jalan yang benar (Pedoman, 10 Juli 1950).

Berapa banyak jumlah pelacur di Jawa Timur dalam periode 1948 – 1950, tidak ada angka yang pasti. Perkiraan Jawatan Sosial pada tahun 1950 di tiap karesidenan rata-rata terdapat 200 orang pelacur (Pedoman, 24 Nopember 1950). Bila di Jawa Timur terdapat tujuh karesidenan berarti didapat angka 1.400 orang. Jumlah yang sebenarnya sangat mungkin lebih dari itu. Sebagai bukti, setelah diadakan pendaftaran di Kabupaten Jember terdapat 600 orang pelacur, tersebar dalam 102 tempat pelacuran. Jumlah itu belum termasuk yang melakukannya secara diam-diam. Tempat-tempat pelacuran yang cukup besar terdapat di kota Jember, Rambipuji, Tanggul dan Ambulu. Kota Jember menjadi terbesar, bahkan di sini pelacuran sudah merambah hotel-hotel. Pelacuran di Jember menurut penyelidikan tidak hanya di kalangan bawah saja tetapi juga di kalangan menengah. Kalangan menengah melakukan perbuatan bukan karena desakan ekonomi tapi karena terdorong oleh kenikmatan seks (Pedoman, 19 Desember 1950).

Setiap malam di alun-alun Tuban bergelandangan perempuan lacur yang jumlahnya semakin hari semakin banyak (Situasi Politik/Ekonomi, Kementerian Penerangan, ANRI, no. inv. 409). Perempuan-perempuan yang imannya lemah dan terdorong kesulitan hidup, terpaksa menjual diri. Tuban menjadi pelabuhan Republik yang demikian penting, setelah sebagian daerah dikuasai dan blokade yang diterapkan Belanda. Sebagaimana yang terjadi pada kota pelabuhan pada umumnya, pelacuran menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam keberadaannya. Di Surabaya pada sebuah kampung terdapat lokalisasi yang cukup besar. Tercatat 3.000 perempuan nakal mengais penghidupan di

tempat ini. Jumlah ini perlu ditambah dengan yang menjajakan diri secara liar di beberapa tempat, seperti di Jalan Kayun dan di rumah-rumah kecil di beberapa kampung (Merdeka, 18 Nopember 1950). Di kota Surabaya terdapat juga beberapa nyonya tua yang menyediakan wanita lacur sekaligus tempat pertemuan bagi yang membutuhkannya. Wanita yang menjadi anak buahnya terdiri dari berbagai latar belakang, seperti pelayan toko, pegawai kantor, pelayan rumah makan, pelayan tempat minum, bahkan wanita yang berkeluarga (Bagian Eropa, Kabinet Perdana Menteri RI Yogya, ANRI, no. inv. 80).

Prostitusi identik dengan penyakit kotor. Dalam suasana konflik masih banyak ditemukan pemuda yang kena penyakit kotor, karena rumah-rumah pelacuran masih tetap beroperasi. Kebanyakan pemuda yang bertandang ke tempat itu tidak mengerti bahayanya. Penyakit itu dapat merusak seluruh sisa hidupnya hanya dengan mendapatkan kenikmatan sebentar. Tubuh tergolek lemah dan rusak digerogeti penyakit kotor sering dijumpai di tempat-tempat perawatan (Djajadiningrat, 1975: 83). Sementara tenaga para pemuda malam itu sangat dibutuhkan dalam perjuangan. Penderitaannya menjadi semakin bertambah karena kelangkaan obat-obatan.

Sekitar 500 wanita lacur pernah ditangkap. Oleh karena pemerintah tidak mempunyai tempat-tempat penampungan khusus kebanyakan kemudian dilepas kembali. Sekitar 100 orang diantaranya yang masih baru menjalani profesi dikembalikan ke desa masing-masing. Akan tetapi setibanya di desa tidak ada pekerjaan yang dapat memberikan jaminan hidup. Keinginan untuk bekerja tetap ada demi bertahan hidup tapi kondisi ekonomi dan politik yang sulit menutup keinginan itu. Dalam keadaan demikian mudah dibujuk oleh wanita lain atau laki-laki, kebanyakan

terjerumus lagi (Pedoman, 10 Juli 1950). Pelacur yang ditangkap dikenai hukuman membayar denda R. 300 hingga R. 500. Ternyata denda itu dibayar dengan mudah oleh orang-orang yang bergerak di belakang layar, diperkirakan “kasir” wanita-wanita itu. Bahkan di antara wanita-wanita yang ditangkap ke luar kata-kata “biarlah kita ditangkap, nanti mereka yang menangkap toh lelah sendiri” (Pedoman, 24 Nopember 1950). Sebenarnya para germo justru yang lebih berbahaya karena acapkali bertindak sebagai biang keladi maraknya pelacuran. Para pelacur tidak akan mudah dan leluasa berbuat bila tidak ada yang menerima dan melindungi. Lebih-lebih bagi pelacur pindahan dari tempat lain dan wanita yang baru pertama kali menjalani pekerjaan ini. Germa tidak hanya menerima dan memberi tempat, tetapi juga membujuk wanita yang tidak kuat imannya, sebab bila markasnya berisi wanita-wanita cantik dan baru, berarti penghasilannya semakin banyak.

Pada pertengahan tahun 1950 oleh Jawatan Sosial, RK (Rukun Kampung) dan pamongdesa, kepada penghuni rumah-rumah maksiat yang ada di beberapa kampung diminta mau disatukan dalam sebuah tempat saja. Dengan demikian akan mudah dikontrol dan tidak mengganggu kampung-kampung yang masih baik. Dengan berkumpul dalam satu kampung akan mudah diperiksa kesehatannya, direncanakan pendidikannya dan dipikirkan cara “memulihkan kembali” ke masyarakat (Merdeka, 18 Nopember 1950). Kalau di tempat lain pelacur ditangkap untuk diberi ketrampilan, di Surabaya sedapat mungkin digiring ke satu kampung tetap dengan profesinya untuk kemudian dididik.

Revolusi juga menghasilkan fenomena sosial yang sebelumnya juga ditemukan pada zaman penjajahan Jepang. Ditemukan gadis-gadis terpelajar yang hamil tanpa ada suaminya. Kebanyakan

berasal dari murid sekolah menengah. Pada pertengahan tahun 1950 sebagian besar gadis-gadis malang itu tinggal menunggu kelahiran bayinya. Untuk sementara para gadis malang itu ditangani oleh PMI. Bila pada zaman penjajahan Jepang realita seperti ini lebih banyak karena tipuan dan paksaan, pada masa revolusi ini penyebabnya lain. Dari para gadis itu diperoleh pengakuan bahwa akibat konflik bersenjata dan serangan militer Belanda dirinya terpisah dari orang tuanya. Dalam kondisi praktis tanpa perlindungan sebagian dari para gadis itu mendapat perlakuan kekerasan seksual. Sebagian lagi terpaksa menjual diri agar bisa bertahan hidup (Pedoman, 7 Juni 1950).

Jenderal Mayor dr. Mustopo mendirikan organisasi dengan nama Terate. Anggotanya terdiri dari pelacur dan pelaku tindak kriminal (Rekaman wawancara: Mustopo, ANRI, no. inv. 58; Mustopo, tt: 25; Rapat Territorial Commando Djawa Timur, Kementerian Penerangan, ANRI, no. inv. 167). Di suatu tempat di daerah pegunungan, termasuk wilayah Kabupaten Magetan, pelacur-pelacur itu diberi penerangan dan latihan sebelum diterjunkan ke kota-kota yang diduduki Belanda. Tugasnya mendapat informasi tentang militer Belanda dan situasi-kondisi kota. Pengakuan Syarif Thayep bahwa para pelacur diperintahkan untuk memotong kemaluan tentara Belanda setelah bersenggama tampaknya berlebihan (Rekaman wawancara: Syarif Tayib, ANRI, no. inv. 79). Perbuatan ini amat beresiko bagi si pelacur dan berbahaya bagi operasi semacam ini selanjutnya. Tentara Belanda totok yang sudah berpisah dengan istri cukup lama seringkali dihindangi rasa rindu. Banyak dari tentara itu baru pertama kali pergi ke Indonesia sehingga tidak heran bila perasaan ingin bertemu istri demikian besar. Bagi yang masih bujangan kerinduan pada tanah airnya justru yang lebih tampak

(Laporan Polisi Keamanan Karesidenan Bojonegoro, Delegasi Indonesia, ANRI, no. inv. 538). Untuk melupakan kerinduan banyak diantaranya yang mencari hiburan. Hal seperti inilah yang dimanfaatkan benar oleh para pelacur. Gambar-gambar porno menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam operasi para pelacur ini (Wawancara dengan Karsono, 10 Maret 2009). Gambar-gambar cabul disebarkan ke tangsi-tangsi militer. Anggota militer yang termakan dan terpikat akan mendatangi tempat-tempat pelacuran. Dari tentara yang terjebak operasi ini diharapkan tidak hanya informasi penting yang diperoleh tetapi juga keruntuhan moral tentara musuh.

Untuk mengatasi permasalahan prostitusi pemerintah menempuh berbagai macam cara. Ada keinginan peraturan-peraturan pemerintah mengenai pemberantasan prostitusi akan betul-betul dijalankan. Untuk itu harus ada bantuan sepenuhnya dari masyarakat, terutama organisasi-organisasi wanita dengan penuh dedikasi. Langkah lain meminta bantuan pada pemuka-pemuka agama untuk memberikan penerangan-penerangan. Tidak kalah pentingnya memberikan pendidikan seks pada masyarakat, terutama pelajar sekolah menengah (Merdeka, 9 Juni 1950). Pemerintah menyediakan dana f. 120.000 untuk usaha pemberantasan pelacuran. Prioritas utama diperuntukkan membangun tempat rehabilitasi (Pedoman, 10 Juli 1950). Menurut J.H.W. Warners untuk memberantas pelacuran dapat ditempuh 3 macam jalan, yaitu: (1) preventif, diusahakan pendidikan terutama kepada kelompok umur muda, (2) represif, menjalankan peraturan-peraturan yang terkait secara baik, dan (3) rehabilitasi, diusakan membangun tempat-tempat pelatihan untuk memberi ketrampilan (Merdeka, 20 Oktober 1950). Di tempat itu para wanita itu diajarkan berbagai ketrampilan dan diper-

baiki ahlaknya. Diharapkan berbagai keterampilan yang dilatihkan dapat dijadikan modal untuk membuka lapangan kerja sehingga tidak kembali ke dunia hitam lagi.

Di Situbondo atas inisiatif sebuah panitia yang dipimpin oleh Penghulu Muda dengan dibantu pihak kepolisian, pamong praja dan Jawatan Sosial, dilakukan usaha pemberantasan pelacuran. Para pelacur dan induk semangnya dikumpulkan dalam suatu asrama. Di sini selain diberi pencerangan juga diberi nasehat-nasehat keagamaan. Pihak panitia hingga tanggal 17 Agustus 1950 telah berhasil mengawinkan 165 orang wanita lacur, 4 orang diantaranya dinikahi oleh laki-laki Cina. Beberapa orang dipulangkan ke rumah masing-masing dengan terlebih dahulu membuat janji untuk tidak melakukan pekerjaan hina seperti ini lagi. Setelah tanggal itu pihak panitia masih menerima 10 orang lagi berserta dua orang geromo dari Jawatan Sosial. Di antara 10 orang wanita yang baru datang itu, dua orang telah berhasil dikawinkan, sementara sisanya delapan orang telah ada calon suaminya, tapi karena kendala urusan administrasi belum dapat dikawinkan (Pedoman, 29 September 1950; Merdeka, 27 Oktober 1950).

Catatan Penutup: Kelompok Sosial Lain Perlu Kajian Lebih Lanjut

Hasil dan pembahasan sesuai dengan tujuan yang dipaparkan pada pendahuluan. Hasil dan pembahasan sesuai dengan tujuan yang dipaparkan pada pendahuluan. Hasil dan pembahasan sesuai dengan tujuan yang dipaparkan pada pendahuluan. Hasil dan pembahasan sesuai dengan tujuan yang dipaparkan pada pendahuluan. Hasil dan pembahasan sesuai dengan tujuan yang dipaparkan pada pendahuluan.

Mengapa pelacur dan pelaku kriminal itu mau terlibat dalam aksi yang beresiko tidak kecil? Dengan tidak mengabaikan alasan lain, sangat mungkin pertimbangan ekonomi menjadi alasan dominan. Situasi perekonomian RI dalam suasana revolusi terus memburuk dan kehidupan menjadi sulit. Otak dalam operasi pemanfaatan pelacur dan pelaku kriminal adalah Jenderal Mayor drg. Mustopo, salah satu pelaku bisnis militer. Perusahaan yang dikendalikannya mempunyai cabang di beberapa kota di Jawa Timur, sehingga dapat dipastikan mempunyai cukup dana untuk mendukung operasi "Terate". Diperkuat oleh pengakuan Syarif Thayep bahwa Jenderal Mayor drg. Mustopo memiliki cukup dana, sehingga kesatuan-kesatuan lain sering minta dana kepadanya (Rekaman wawancara: Syarif Tayib, ANRI, no. inv. 79). Selain ekonomi, tidak tertutup kemungkinan ada motif-motif lain yang lebih bersifat idealis. Situasi revolusi menjanjikan suatu perubahan. Di antara pelacur ada yang menyimpan harapan bila kemerdekaan dapat diraih dan Belanda meninggalkan Indonesia situasi akan berubah, maka berubah pula nasibnya. Harapan ini kiranya sulit terwujud, sebab aksi ini mendapat kritik tajam. Dengan alasan menodai perjuangan, muncul desakan untuk membubarkan Terate. (Rapat Territorial Commando Djawa Timur, Kementerian Penerangan, ANRI, no. inv. 167). Sementara bagi para pelaku tindak kriminal selain ekonomi faktor kebebasan menjadi pertimbangan lain. Sebagian dari orang-orang ini direngkut ketika masih meringkuk dalam penjara. Mendapat kebebasan, meskipun dengan syarat dimanfaatkan "keahliannya", menjadi pilihan yang lebih menguntungkan daripada meringkuk dalam penjara.

Di samping menggunakan pelacur pihak Republik juga menebar mata-mata lain. Dalam tubuh dinas intelejen Belanda,

Nefis (Netherland Forces Intelligence Service), di Jawa Timur ditempatkan orang bernama Soejoso. Dari orang ini banyak diperoleh informasi cara kerja mata-mata Belanda dan organisasi-organisasi pengacau yang disponsori Nefis (Wawancara dengan Karsono, 6 April 2009). Sementara mata-mata yang lain melakukan berbagai penyamaran dalam berbagai profesi, seperti pedagang sayur, pedagang keliling, pembantu (jongos), buruh kasar di pangkalan militer Belanda dan anak sekolah. Mata-mata yang menyamar sebagai bakul ideran (pedagang keliling) paling banyak ditemukan dan lazim dilakukan. Mobilitas bakul yang relatif tinggi menjadi pertimbangan utama mengapa profesi ini dipilih. Dengan mobilitas demikian mampu ditangkap informasi kondisi di daerah kekuasaan musuh (Instruksi Pimpinan Pertahanan Rakyat, Djogja Documenten, ANRI, no. inv. 214; Badan Arsip Propinsi Jawa Timur, 2000). Di daerah Kawi Selatan, Kapten Syamsudin mengorganisir bakul-bakul (pedagang). Para bakul yang sering ke luar-masuk Kota Malang untuk berjualan dimanfaatkan sebagai

kurir, informan dan membawa barang-barang yang dibutuhkan gerilyawan, misalnya obat-obatan (Padmodiwiryo, 1995: 296). Dari mata-mata tidak hanya diperoleh informasi bersifat verbal, tetapi pada saat-saat tertentu diperoleh barang-barang yang dibutuhkan oleh tentara, peluru misalnya. Di Probolinggo petani yang dipekerjakan sebagai buruh kasar di tangsi militer dimanfaatkan untuk memperoleh peluru. "Biasanya para petani ini diberi roti untuk dibawa pulang, di dalam roti itulah ditaruh peluru dari berbagai ukuran. Jumlahnya tidak selalu tetap, kadang sampai tujuh tetapi sering juga cuma dua atau tiga butir" (Sapto, 1999: 153). Peluru-peluru curian kemudian dikumpulkan dan dibagikan sesuai ukuran dan jenis senjatanya. Tidak jarang peluru-peluru ini tidak mempunyai "pasangannya", sebab pihak gerilyawan tidak memiliki jenis senjatanya. Hal ini bisa dimaklumi, para "petani" itu tidak pernah mendapat latihan kemiliteran, sehingga tidak mengenal jenis amunisi.

DAFTAR RUJUKAN

I. Arsip

- Algemeene Secretarie, 1944-1950, ANRI, Jakarta
- Delegasi Indonesia, 1947-1951, ANRI, Jakarta
- Kabinet Perdana Menteri RI Yogya, 1949-1950, ANRI, Jakarta
- Kementerian Penerangan, 1945-1949, ANRI, Jakarta
- Kementerian Sosial dan Perburuhan, 1946-1950, ANRI, Jakarta

Sekretariat Negara, 1945-1949, ANRI, Jakarta

Yogya Dokumenten, 1946-1948, ANRI, Jakarta

II. Penerbitan Sumber

- Chaniago, J.R., dkk., PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) Dalam Khasanah Kearsipan. Jakarta: ANRI, 1989.
- Drooglever, P.J. (Ed.), Officiële bescheiden betreffende de Ne-

derlands-Indonesische be-
trekkingen 1945-1950, XIII.
The Hague: Martinus
Nijhoff, 1986a

----- Officiële bescheiden betreffende de
Nederlands-Indonesische be-
trekkingen 1945-1950, XVI.
The Hague: Martinus
Nijhoff, 1986b

Yayasan 19 Desember 1948, Dokumen RI-
PRESS Dalam Perang
Rakyat Semesta 1948-1949.
Jakarta: Balai Pustaka, 1994

Yuniarti, F., (Kord.), Perdagangan Candu
Tahun 1830 Sampai Dengan
Perang Kemerdekaan Repub-
lik Indonesia. Jakarta: ANRI,
2005

III. Dokumen Pengalaman Pelaku (Tidak Diterbitkan)

Moestopo, Sejarah Nasional Logika-Ratio-
Fakta-Data. Jakarta: tp, tt

Pengakuan Kartirin Ask, dalam DHD '45,
Daftar Riwayat Hidup Sing-
kat Pelaku Pertempuran 10
Nopember 1945. Surabaya:
DHD Angkatan '45, 1976

Pengakuan Moch. Sifun, dalam DHD 45,
Daftar Riwayat Hidup Sing-
kat Pelaku Pertempuran 10
Nopember 1945. Surabaya:
DHD Angkatan 45, 1972

Sumber Lisan

Rekaman wawancara: Ismi Soemarmi
Wahjoeadi. Surabaya: Ba-
dan Arsip Propinsi Jawa Ti-
mur, 2003

Rekaman wawancara: Moestopo. Jakarta:
ANRI, no. inv. 58

Rekaman wawancara: Pudjiharjo. Sura-
baya: Badan Arsip Propinsi
Jawa Timur, 2000

Rekaman wawancara: Suroso. Surabaya:
Badan Arsip Propinsi Jawa
Timur, 2003

Rekaman wawancara: Syarif Tayib. Ja-
karta: ANRI, no. inv. 79

Wawancara

Joyotari, Karsono, Moh. Rifai, Muhyidin,
Nari, Soetjipto Kertodjojo.

Suratkabar

De Vrije Pers, 1949

Merdeka, 1950

Pandji ra'jat, 1948

Pedoman, 1950

Pelita Rakyat, 1948

Pemandangan, 1949

VI. Terbitan Berkala

Gunawan, R., "Jagoan Dalam Revolusi
Kita", Prisma, No. 8, Tahun
ke X, Agustus. Jakarta:
LP3ES, 1981, hlm. 41-50

Han Bing Siong, "The Indonesian Need of
Arms After the proclamation
of Independence", Bijdragen
tot de Taal-Land en
Volkenkunde, 157, 4. Lei-
den: KITLV, 2001, hlm. 799-
830

- Kartodirdjo, S., "Wajah Revolusi Indonesia Dipandang dari Perspektivisme Struktural", *Prisma*, No.8. Agustus. Jakarta: LP3ES, 1981, hlm. 3-13
- McVey, R., "The Post-Revolutionary Transformation of The Indonesian Army", *Indonesia*, No. 11 (April). Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, 1971, hlm. 131-176
- Reid, A., "Revolusi Sosial: Revolusi Nasional", *Prisma*, No. 8 Tahun ke-X. Agustus. Jakarta: LP3ES. 1981, hlm. 33-40
- VII. Buku
- Anderson, B.R.O'G. *Revoloesi Pemoeda, Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa, 1944-1946*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988
- Antlov, H. & Sven Cederroth (Ed.), *Kepemimpinan Jawa, Perintah Halus, Pemerintahan Otoriter*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001
- Brinton, C., *The Anatomy of Revolution*. New York: Vintage Book, 1965
- Bundi, dkk., *Wayang Suluh Bojonegoro*. Surabaya : Bagian Proyek Pembinaan Permuseuman Jawa Timur, 1993/1994
- Chaniago, J.R., "Lintasan Sejarah PDRI (1948-1949)", dalam Abdurrachman Surjomihardjo & J.R. Chaniago (Ed.), *Pemerintah Darurat Republik Indonesia Dikaji Ulang*. Jakarta: Masyarakat Sejarawan Indonesia.1990, hlm. 42-54
- Cribb, R.B., *Gangsters and Revolutionaries, The Jakarta Peoples Militia and the Indonesia Revolution, 1945-1949*. Sydney: Allen & Unwin Pty Ltd, 1991
- Giebels, L., *Soekarno, Biografi 1901-1950*. Jakarta: Grasindo, 2001
- Groen, P.M.H., *Marsroutes en dwaalsporen, het Nederlands Militair-strategisch beleid in Indosnesie 1945-1950*. The Hague: Historical Section of the Royal Netherlands Army, 1991
- Groenendael, V.M.C.v., *Dalang di Balik Wayang*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1987
- Kahin, G.Mc.T., *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1952
- Lucas, A.E., *Peristiwa Tiga Daerah, Revolusi Dalam Revolusi*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989
- Nasution, A.H., *Pokok-pokok Gerilya dan Pertahanan Republik Indonesia di Masa Lalu dan Yang Akan Datang*. Bandung: Angkasa, 1984
- Nursam, M., *Memenuhi Panggilan Ibu Pertiwi, Biografi Laksamana*

- Muda John Lie. Yogyakarta: Ombak, 2008
- Padmodiwiryo, S., *Memoar Hario Kecik. Autobiografi Seorang Mahasiswa Prajurit*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995
- Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, *Lamongan Melayu Raharjaning Praja*. Lamongan: Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, 1994
- Poeze, Tan Malaka, *Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia*, Jilid I, Agustus 1945-Maret 1946. Jakarta: KITLV-Jakarta & Yayasan Obor Indonesia, 2008
- Prawirodirdjo, K., *Dongengan 45: Dari Panggung Sejarah Perang Kemerdekaan Indonesia*, Jilid 1. Jakarta: Mutiara, 1978
- _____. *Dongengan 45: Dari Panggung Sejarah Perang Kemerdekaan Indonesia*, Jilid 2. Jakarta: Mutiara, 1978
- Rasjid, S.M., *Di Sekitar PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia)*. Jakarta: Bulan Bintang, 1982
- Roem, M., *Diplomasi: Ujung Tombak Perjuangan RI*. Jakarta: Gramedia, 1989
- Salim, I., *Terobosan PDRI dan Peranan TNI*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995
- Sapto, A., "Gerilya Kota di Probolinggo 1947-1949", Thesis. Jakarta: PPS UI, 1999
- Sastroamidjojo, A., *Tonggak-tonggak di Perjalananku*. Jakarta: PT. Kinta, 1974
- Semdam VIII/Brawidjaja, Sam Karya Bhirawa Anoraga, *Sejarah Militer KODAM VIII/BRAWIJAYA*. Malang: Semdam VIII/Brawijaya, 1968
- Slamet-Velsink, I., "Kepemimpinan Tradisional di Pedesaan Jawa", dalam Hans Antlov & Sven Cederroth, *Kepemimpinan Jawa, Perintah Halus-Pemerintahan Otoriter*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001, hlm. 46-78
- Soewito, I.H.N.H., *Rakyat Jawa Timur Mempertahankan Kemerdekaan*, Jilid 3. Jakarta: Grasindo, 1994
- Sudarno, dkk., *Sejarah Pemerintahan Militer dan Peran Pamong Praja di Jawa Timur Selama Perjuangan Fisik 1945-1950*. Jakarta: Balai Pustaka, 1993
- Sukadri, H., Soewarno, Umiati, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) Daerah Jawa Timur*. Jakarta: Proyek IDSNI, 1991

- Supriyanto, H., Deskripsi Lakon Ludruk di Malang. Malang: Dewan Kesenian Malang, 1984
- Surjomihardjo, A. & J.R. Chaniago (Ed.), Pemerintah Darurat Republik Indonesia Dikaji Ulang. Jakarta: Masyarakat Sejarawan Indonesia.1990
- Sutomo, S., Bung Tomo Suamiku, Biar Rakyat Yang Menilai Kepahlawananmu. Jakarta: Visimedia, 2008
- Tashadi, Darto Harnoko, Suratmin, Partisipasi Seniman Dalam Perjuangan Kemerdekaan di Propinsi Jawa Timur: Studi Kasus Kota Surabaya Tahun 1945-1949. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999
- Tilly, C. From Mobilization to Revolution. Sydney: Addison-Wesley Publishing Company, 1978
- Twang Peck Yang, Elite Bisnis Cina di Indonesia dan Masa Transisi Kemerdekaan 1940-1950. Yogyakarta: Niagara, 2005
- Weber, M. "The Routinization of Charisma", dalam Selo Soemardjan & Soelaeman Soemardi, Setangkai Bunga Sosiologi. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1974
- Wertheim, W.F., Evolution and Revolution, The Rising Waves of Emancipation. Middlesex: Penguin Books, 1974
- Willner, A.R. and Dorothy Willner, "The Rise and Role of Charismatic Leaders", dalam Ronald Ye-Lin Cheng (Ed.), The Sociology of Revolution, Readings on Political Upheaval and Popular Unrest. Chicago: Henry Regnery Company, 1973, hlm. 194-204
- Yamin, M., Pembentukan dan Pembubaran Uni. Jakarta: Bulan Bintang, tt
- Ye-Lin Cheng, R. (Ed.), The Sociology of Revolution, Readings on Political Upheaval and Popular Unrest. Chicago: Henry Regnery Company, 1973
- Zed, M., Somewhere in the Jungle. Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Sebuah Mata Rantai Sejarah yang Terlupakan. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997.